

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Kusufi, M.S. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Ed. ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ibnu Syamsi. 1986. Pokok Pokok Kebiaksanaan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pemangunan Tingkat Nasional. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kaho. 1998. Peospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi. 2016. Akuntani Pemerintahan. Jakarta: In Media.
- Nurlan Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Indeks.
- Nordiawan Deddi, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto dan Icut Rangga Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Slamet Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: EdisiEmpat, Liberty.
- Sony Yuwono. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Bayumedia.

Internet

www.beritasatu.com diakses pada tanggal, 20 April 2019 pukul 15.18

www.kontan.co.id diakses pada tanggal, 20 April 2019 pukul 15.20

Peraturan Perundang - undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016